Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3 (1) (2015): 30-39

Jurnal Administrasi Publik

http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma

Pengaruh Pendidikan Dan Latihan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman

Rusdianto, Indra Muda*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Februari 2015 ;Disetujui April 2015; Dipublikasikan Juni 2015

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdapat pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 27 orang. Pemilihan informan berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan memiliki data dan bersedia memberikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai yang diikutsertakan mengikuti Diklat umumnya sudah memiliki latar belakang yang relevan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pegawai yang telah selesai mengikuti Diklat pada umumnya memiliki kinerja atau prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan sebelum mereka mengikutinya. Penyelenggaraan Diklat berupa Diklat dalam jabatan, diklat khusus dan bentuk sosialisasi yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai sehari-hari. Untuk menjaga kontiniunitas pelayanan publik pada Sub Bagian Keuangan, pegawai yang dikirim mengikuti Diklat disesuaikan dengan volume kerja.

Kata Kunci : Pendidikan; Latihan; Kinerja Pegawai

Abstract

This research is a kind of qualitative research. The population in this study is all employees who are in the Sub Division of Finance Department of Spatial Planning and Settlement of North Sumatra Province, amounting to 27 people. Selection of informants based on subjects who mastered the problem of having data and willing to provide data. The results showed that employees who participated in the Training have generally have a background relevant to the position or work. Employees who have completed the training generally have better performance or work performance than before they follow. Implementation of Training in the form of Training in positions, special training and socialization related to the daily work of the employees. To maintain the public service continiommunity in the Sub-Division of Finance, employees who are sent follow the Training adjusted to the volume of work.

***Keywords**: Education; Exercise; Employee Performance*

How to Cite : Rusdianto, Indra Muda, (2015). Pengaruh Pendidikan Dan Latihan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
3 (1): 30-39

*Corresponding author:
E-mail: indramudahts@gmail.com

P-ISSN-2549-9165
e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang cepat mau tidak mau harus dihadapi bangsa Indonesia. Jika tidak, Indonesia akan tertinggal dari Negara-negara lainnya. Hal ini tentu memerlukan pengembangan sumber daya aparatur sedemikian rupa seperti dikemukakan Kristiadi, (1997:22) bahwa "sumberdaya aparatur mempunyai kedudukan yang sangat penting karena mereka sekaligus melaksanakan fungsi sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas kegiatan pembangunan".

Sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan, berarti peran dan fungsi aparatur pemerintah dalam pembangunan menduduki tempat yang sangat strategis. Untuk dapat melaksanakan tantangan tersebut, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki, menguasai, dan mempraktekkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta perilaku yang baik. Jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif dan efisien maka pengetahuan yang tinggi seluruh staf organisasi terhadap pelaksanaan tugasnya merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan atau kualitas aparatur ini adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa ada usaha-usaha konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, Diklat aparatur baik yang bersifat struktural maupun fungsional, perlu terus ditingkatkan agar aparatur benar-benar mampu berfungsi sebagai fasilitator, motivator, bahkan sebagai pelaksana, pelopor, dan penggerak pembangunan (*agent of change*).

Pengembangan sumberdaya manusia khususnya bagi aparatur Negara pada intinya adalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah yang terutama ditekankan pada kebutuhan masyarakat secara luas, dan ini juga tidak terlepas dari kemampuan kepemimpinan aparatur Negara. Artinya, diperlukan adanya aparatur Negara selaku manajer yang mampu melakukan proses kegiatan melalui kepemimpinannya dengan pendekatan manajemen dalam menggerakkan bawahannya. Dengan kata lain, manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang mencakup perencanaan, pengaturan, motivasi, dan pengendalian.

Pengembangan sumberdaya aparatur negara harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, justru itu langkah yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk melakukan perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang diarahkan kepada peningkattan kemampuan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin dinamis. Pengembangan yang berorientasi jangka pendek dapat terlihat dari tersedianya berbagai program pendidikan dan pelatihan (*training*) bagi aparatur, baik Diklat struktural ataupun teknis fungsional yang telah diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah yang dianggap telah mampu melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud. Demikian pula dengan pengembangan sumberdaya aparatur yang berorientasi jangka panjang, pemerintah telah mengirim aparaturnya untuk dapat mengikuti berbagai pendidikan formal bergelar pada berbagai perguruan tinggi yang ada di tanah air dan di luar negeri melalui berbagai kerjasama dengan Negara penerima.

Pada akhir pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural para aparatur pemerintah yang telah mengikutinya diharapkan telah memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan guna menduduki jabatan sebagai manajer pada tingkat menengah, memiliki kualitas tertentu yaitu memiliki wawasan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang dikehendaki.

Dengan demikian kualitas aparatur pada intinya merupakan pencapaian derajat kemampuan dan pengendalian dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang dapat dilakukan secara maksimal melalui tersedianya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang profesional dan handal yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan kemampuan manajerial.

Realitas menunjukkan masih ada terjadi alumni Diklat walaupun telah mendapat pembekalan berbagai keterampilan belum sepenuhnya dapat menerapkannya pada bidang tugas tempatnya bekerja. Hal ini tentu

menjadi kegiatan yang tidak dapat memberikan manfaat yang positif bagi peningkatan kinerja organisasinya karena terkesan Diklat hanya dijadikan sebagai formalitas tanpa melihat seberapa besar hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan Diklat tersebut. Keadaan seperti ini juga terjadi pada Kantor Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga pegawai yang sudah menyelesaikan Diklat tidak dapat menerapkannya sesuai dengan penempatan dan kedudukannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari yang mewakili populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdapat pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 27 orang. Dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi dan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam diperlukan informan yang kompeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang hal itu (Nasution, 1996 : 32-33).

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian sehingga informan harus banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 1998 : 90). Informasi dari sejumlah informan dianalisis untuk menemukan hal-hal yang menonjol, menarik, penting dan berguna untuk diteliti selanjutnya secara mendalam. Penentuan informan pada penelitian kualitatif dilakukan secara purporsive atau secara sengaja. (Nasution, 1996 : 32). Adapun kriteria yang dapat dipergunakan dalam memilih dan menentukan seorang informan adalah sebagai berikut : harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota, salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi (Moleong, 1998 : 90).

Pemilihan informan berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan memiliki data dan bersedia memberikan data. Mengingat tujuan penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan Diklat dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pegawai pada Distarukim Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan memakai metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi (Moleong, 1998 :125-165). Metode Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan oleh seorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendpatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seseorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara individual dengan informan (*individual interview)* dengan diajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya atau *standardize interview.* Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagian besar bersifat tertutup *(cicsed interview)* dan selebihnya bersifat terbuka *(open interview)*. Sedangkan pencatatan keterangan dan pendapat hasil wawancara, dilaksanakan dengan cara pencatatan langsung, dan dengan cara pencatatan field coding.

Pemakaian metode Observasi dalam rangka pengumpulan data hanya dipakai bila data yang diperlukan tidak dapat dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang telah digunakan (seperti wawancara, dan dokumentasi). Tehnik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan dan arsip-arsip yang tersedia. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992, 15-20) mengemukakan analisis model interaktif dengan 3 prosedur yaitu : reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Reduksi Data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang

diperoleh dilapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara : pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalah dan fokus penelitian. Reduksi Data/Proses Transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

Penyajian data atau display data dimaksud sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut daat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengagn cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan *(Network)* dan bagan *(Chart)* atau bentuk teks naratif (kumpulan kalimat). Semuanya dirancang digunakan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung dan dilakukan secara kontinyu sepanjang penelitian. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul dan disimpulkan secara tentatif, sehingga terbentuk proporsi tertentu yang bisa mendukung teori atau penyempurnaan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub Bagian Keuangan adalah merupakan salah satu bidang tugas yang berada di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Membicarakan Sub Bagian Keuangan tentu tidak bisa dipisahkan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, karena Sub Bagian Keuangan merupakan salah satu bidang tugas yang ada dalam lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara. Kemudian, sebagai institusi yang berada di bawah Gubernur Sumatera Utara dalam kerangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara memiliki gedung kantor yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Nomor 9 Medan. Letak gedung kantor ini sangat strategis yang berada di jantung Kota Medan, berdekatan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor Walikota Medan dalam radius lebih kurang 1 Km. Dengan letak strategis yang demikian, bagi masyarakat yang ingin berurusan dengan instansi tersebut dapat menjangkauanya dengan mudah baik dengan menggunakan transportasi umum maupun dengan menggunakan kenderaan pribadi.

Perjalanan panjang dan perkembangan yang dilalui Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara sebagai instansi yang berada di bawah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari perkembangan yang dialami sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Lama, ketika Aceh dan Sumatera Utara masih tergabung dalam otonomi yang sama, maka wilayah kerja dari instansi ini meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, maka wilayah kerjanya berubah lagi mencakup lingkup Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, maka sistem pemerintahan daerah mengalami perkembangan pesat. Urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sebelumnya terpusat di Jakarta, mengalami perubahan dan diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan pelimpahan kewenangan ini, maka kegiatan di daerah semakin dinamis termasuk dalam urusan penataan ruang dan permukiman.

Dengan semakin dinamisnya tugas-tugas pemerintahan di daerah dan perubahan tatanan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa instutusi atau lembaga-lembaga pemerintahan mengalami perubahan, penggabungan atau merger dengan institusi yang lainnya. Hal ini dialami oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya dari tahun 1990 hingga tahun 2001 adalah bernama Dinas Cipta Karya.

Kemudian, dari tahun 2001 hingga tahun 2013 Dinas Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Dinas Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Sumatera digabung menjadi 1 institusi dengan nama baru yaitu, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dengan penggabungan 3 institusi ini, maka seluruh pegawai yang ada pada masing-masing institusi secara otomatis berada di bawah Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, maka penempatan personil atau pegawai dalam lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di dasarkan kepada penerbitan Peraturan Daerah. Untuk keperluan tersebut, Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provionsi Sumatera Utara. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi seluruh Dinas-Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor 061.1/1589-TARUKIM. PROVSU/2012 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Pendidikan dan latihan adalah suatu proses yang berkelanjutan, hal ini disebabkan kebutuhan manusia yang selalu terus berubah menuju penyempurnaan dan perbaikan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang cenderung berubah tersebut, maka pihak-pihak yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada publik senantiasa harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang yang dilayani.

Cara yang paling lazim ditempuh untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang adalah melalui pendidikan dan latihan karena dengan pendidikan dan latihan disamping penyelenggaraannya singkat juga materi pelatihannya dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam instansi pemerintah, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu diwajibkan sudah mengikuti pendidikan dan latihan. Dengan prasayarat ini, diharapkan mereka yang akan ditempatkan pada kedudukan tertentu sudah memiliki dasar-dasar keterampilan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pada Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Latihan dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL: PEGAWAI SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGIKUTI DIKLAT TAHUN 2014

No	N a m a	Satuan Tugas
1	Lasak Sitorus	Staf Keuangan
2	Erki Hafianda	Staf Keuangan
3	Irwansyah	Staf Keuangan
4	Nani Wartabone	Staf BPL

5	Mariatha Erlina Tarigan	Staf BPL
6	Atur Panje	UPT K. Sewa
7	Lisbetr	TBJU
8	Nurismaini Sitompul	Staf Keuangan
9	Isnaniyah Nasution	Staf Keuangan
10	Ginda Ika Syahputra	Staf Keuangan
11	Beby M. Nasution	Staf Keuangan
12	Erma Keumala	Staf Keuangan
13	Eka Junira	Staf Keuangan
14	Time Panjaitan	Staf Keuangan

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2013 pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang mengikuti pendidikan dan latihan atau sosialisasi sebanyak 14 orang. Penyelenggaraan Diklat atau sosialisasi ini dilakukan dengan peserta yang berasal dari pegawai-pegawai Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya sudah ditetapkan sebelumnya. Namun yang berasal dari Sub Bagian Keuangan pada tahun 2014 adalah sebanyak 14 orang.

Penyelenggaraan Diklat dilakukan setiap tahun yang berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan di Berastagi yang bertempat di Hotel Sibayak Berastagi. Dalam pelaksanaan Diklat dihadirkan narasumber misalnya dari, Pejabat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Biro Keuangan Setretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Dengan penyelenggaraan diklat ini diharapkan akan dapat memperluas wawasan pegawai atau dapat meningkatkan keterampilannya menyelesaikan tugas-tugas di bidang keuangan yang diberikan kepadanya.

Selain dari bentuk Diklat yang dilakukan setiap tahun ini, kepada pegawai Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara juga diberikan kesempatan mengikuti Diklat dalam jabatan dan Diklat khusus. Diklat dalam jabatan misalnya, mengikut sertakan pegawai mengikuti diklat untuk keperluan kenaikan kepangkatannya seperti, Adum, Adumla dan lain-lain, sedangkan diklat khusus berupa pendidikan dan latihan bidang kebendaharawanan, bidang penyusunan anggaran, pelatihan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan lain-lain.

Penyelenggaraan Pendidikan dan latihan dalam jabatan dan Pendidikan dan Latihan khusus biasanya dilaksanakan di luar daerah seperti, di Jakarta, Padang, Bandung dan lain-lain. Lama penyelenggaraan biasanya berkisar 1 sampai 3 bulan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Diklat biasanya disesuaikan dengan situasi pekerjaan yang dihadapi sehingga dengan pengiriman pegawai tersebut mengikuti pendidikan dan latihan tidak mengganggu pekerjaan pada Bagian Keuangan.

Sebagaimana tugas yang diemban oleh Bidang Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang semakin dinamis, maka kepada pegawai perlu pembekalan pengetahuan sehingga mampu menangani tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Terkait dengan amanah yang terkandung dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pegawai diarahkan untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran, neraca pengeluaran keuangan, laporan arus kas sesuai dengan standard akuntansi pemerintah, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dengan sosialisasi, pendidikan dan latihan yang disampaikan pada acara tersebut apabila dapat difahami dan dikuasai oleh peserta pendidikan dan latihan yang membidangi pengelolaan keuangan dalam

pelaksanan Anggaran dan Belanja Daerah maka pertanggungjawaban keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara akan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan dan jabatan pegawai yang mengikuti diklat dengan jenis diklat yang diikutinya sudah menunjukkan relevansi. Artinya, diklat yang diikuti peserta sesuai dengan jabatan yang didudukinya saat ini, sehingga setelah selesai mengikutinya para pegawai tersebut dapat mengiplementasikannya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Para pegawai ini dapat menyesuaikan kebutuhan tata cara pembuatan laporan pertanggung jawaban berdasarkan standard akuntasi pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah atau badan-badan pengawas lainnya, sehingga pada saat dilakukan pengawasan keuangan oleh badan-badan tersebut, dapat diberikan bukti-bukti keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada uraian diatas telah dikemukakan bahwa, penyelenggaraan Pendidikan dan latihan di lingkungan Dinas penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, khususnya pegawai di Bidang Keuangan biasanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat menghadapi tugas-tugas di bidang keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan pembekalan yang disampaikan pada acara tersebut, dapat memperluas wawasan mereka menghadapi tugas-tugas yang terus berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan manajemen keuangan pemerintah dan manajemen keuangan pemerintah daerah.

Bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan, baik yang diselenggarakan secara tahunan di Berastagi maupun penyelenggaraan Diklat dalam jabatan dan Diklat khusus, biasanya memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang lebih baikl jika dibandingkan dengan pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan latihan tersebut, baik dalam hal memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam hal inisiatif untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dinamisasi kegiatan yang diselenggarakan Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara semakin dinamis. Misalnya dengan pola lama untuk menjumlahkan, mengurangi, membagi angka-angka dengan pola yang lama dilakukan dengan menggunakan kalkulator. Dengan perkembangan teknologi tersebut, maka untuk pekerjaan membagi, mengurangi, menambahkan bukan lagi mutlak dilakukan dengan menggunakan kalkulator melainkan dengan cara perhitungan cepat dengan computer dengan tingkat kesalahan nyaris tidak ada. Untuk dapat mempergunakan cara perhitungan cepat tersebut, maka pegawai yang langsung berhubungan dengan pekerjaan tersebut dikirim untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Setelah mereka selesai mengikuti pendidikan dan latihan, mereka memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum mereka mengikutinya.

Demikian juga halnya tata cara penyimpanan data-data keuangan, dengan pola lama biasa dilakukan dengan transaksi portofolio, penyimpanan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan. Namun dengan penggunaan teknologi yang sudah semakin luas, maka dapat dilakukan penyimpanan melalui flasdisk, penyimpanan di komputer dengan menggunakan password terutama apabila data yang disimpan tersebut bersifat rahasia sehingga tidak dapat dibuka oleh orang-orang yang tidak berkompoten. Untuk menguasai tata cara pengoperasian teknologi informatika tersebut, pegawai dikirim untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Setelah mereka selesai mengikuti pendidikan dan latihan tersebut, memiliki kemampuan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum mengikutinya.

Pendidikan dan latihan adalah merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi. Dengan pendidikan dan latihan akan dapat memperluas wawasan peserta, meningkatkan keterampilan dan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan. Pentingnya penyelenggaraan Diklat juga terkait dengan perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan yang kian cepat. Untuk dapat mengimbangi perkembangan ini maka pegawai perlu dididik dan dilatih sedemikian rupa sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan teknologi yang dipergunakan tersebut.

Dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dinamisasi dan volume pekerjaan setiap tahun terasa semakin dinamis. Untuk menghadapi perkembangan pekerjaan dan penggunaan teknologi tersebut, pegawai diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan, sehingga aktivitas dan pekerjaan kantor dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengemukakan, "Dinamisasi dan volume pekerjaan yang dihadapi setiap tahun semakin dinamis, hal ini tidak hanya di lingkungan Sub Bagian Keuangan akan tetapi juga pada Sub Bagian atai Bidang-bidang pekerjaan lainnya. Untuk dapat menghadapi pekerjaan yang semakin variatif tersebut, kami mengirimkan beberapa orang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara. Untuk mengirimklan pegawai mengikuti pendidikan dan latihan tersebut, disesuaikan dengan jumlah personil pada Sub Bagian Keuangan sehingga dengan pengirimannya mengikuti Diklat tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian keuangan. Setelah selesai mengikuti Diklat tersebut pada umumnya personil memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum mereka mengikutinya".

Dari penjelasan yang disampaikan Kepala Sub Bagian Keuangan tersebut menunjukkan, penyelenggaraan Diklat di lingkungan Sub Bagian Keuangan sangat positif untuk meningkatkan kemampuan pegawai menghadapi tugas-tugas yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pegawai Sub Bagian Keuangan yang menyatakan bahwa, "Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, terkadang kemampuan personil untuk mengimbanginya terlambat misalnya dalam hal penggunaan komputerisasi, pembuatan program dan lain-lain. Sebagai solusi untuk mengejar ketertinggalan tersebut adalah melalui Pendidikan dan Latihan sehingga setelah selesai mengikutinya dapat diimplementasikan salam melaksanakan pekerjaan sehari-hari".

Terkait dengan jadwal, jumlah dan waktu penyelenggaraan pendidikan dan latihan, terlalu kecil dibandingkan dengan dengan kebutuhan, sehingga capaian hasikl yang diharapkan tidak tercapai sebagai mana mestinya. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pegawai Sub Bagian Keuangan mengemukakan,

> *"Penyelenggaraan Diklat terasa masih terlalu singkat misalnya tentang sosialisasi di Berastagi hanya 2 hari, Diklat dalam jabatan 2-4 bulan dan Diklat khusus 2-4 bulan. Untuk Diklat dalam jabatan dan Diklat khusus peserta yang dikirim 1-4 orang pertahun. Jumlah ini masih dirasakan kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Namun demikian, karena pengiriman personil mengikuti Diklat harus disesuaikan dengan jumlah personil yang ada pada Sub Bagian Keuangan, maka pengirimannya dilakukan secara berkala sehingga tidak mengganggu pelayanan administratif dan pelayanan keuangan baik kepada publik maupun kepada unit-unit kerja lainnya".*

Dengan demikian, untuk menghadapi tugas-tugas ke depan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan di lingkungan Sub Bagian Keuangan perlu di tingkatkan, demikian juga dengan keikutsertaan pegawai perlu diperluas sehingga kemampuan personil melaksanakan tugas-tugas bidang keuangan lebih merata. Terkait dengan waktu penyelenggaraan diklat perlu diperluas sehingga penguasaan materi diklat oleh pegawai yang mengikutinya lebih mendalam dan lebih terperinci.

SIMPULAN

Pegawai yang diikutsertakan mengikuti Diklat umumnya sudah memiliki latar belakang yang relevan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pegawai yang telah selesai mengikuti Diklat pada umumnya memiliki kinerja atau prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan sebelum mereka mengikutinya.

Penyelenggaraan Diklat berupa Diklat dalam jabatan, diklat khusus dan bentuk sosialisasi yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai sehari-hari. Untuk menjaga kontiniunitas pelayanan publik pada Sub Bagian Keuangan, pegawai yang dikirim mengikuti Diklat disesuaikan dengan volume kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijaksanaan Negara.* Rineka Cipta, Jakarta.

-------. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*, IKIP Malang

--------. 1998. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi.* FIA Unibraw, Malang.

Dunn, William. N, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Gajahmada, University Press. Yogyakarta.

Islamy, Irfan M. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Bina Aksara, Jakarta.

Kristiadi, J. B. 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Dalam Jurnal Administrasi Pembangunan* Vol. 1 No. 2. 1997 Jakarta: PP. Persadi

Mochtar, R. Sutarto. 2000. *Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama Terhadap Derajat Kemampuan manajerial pada Lembaga Administrasi Negara.* Tesis Pascasarjana UNPAD: Bandung

Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rustandi, R. Achmad. 1992. *Gaya Kepemimpinan Pendekatan Bakat Situasional.* Bandung: Armico

Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suradinata, Ermaya. 1997. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika.* Jakarta: PT Gramedia.

Syamsi, I. 1995. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 1988. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali

Winardi. 1995. *Pengantar Ilmu Manajemen.* Bandung: Nova